



| | |
|--------------|--------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Kompas |

APBD bagi Warga Sejahtera



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2023 disepakati Rp 83,78 triliun. Warga Ibu Kota harus tahu penggunaan anggaran itu.

Harian ini melaporkan, APBD DKI Jakarta 2023 itu naik sekitar Rp 1,2 triliun dari penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Kenaikan terjadi lantaran ada proyeksi peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2022, yang sebelumnya dialokasikan Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun.

APBD DKI Jakarta 2023 terdiri dari pendapatan daerah Rp 74,38 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 9,40 triliun. Alokasi belanja daerah Rp 74,61 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 9,16 triliun. APBD DKI Jakarta itu difokuskan pada tiga program prioritas, dengan alokasi 41,27 persen, yaitu untuk pengendalian banjir, penanganan kemacetan, danantisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Alokasi bagi belanja pendidikan senilai 21,09 persen dan 13,47 persen untuk standar pelayanan minimal kesehatan.

Warga Jakarta harus mengetahui penggunaan anggaran daerahnya, melalui keterbukaan informasi, agar konsisten antara program dan belanja komponen. Apalagi, menurut catatan Indonesia Budget Center, penetapan APBD DKI Jakarta 2023 tepat waktu, yang sebelumnya kerap telat. Selain itu, dua tahun terakhir warga sulit mengakses informasi APBD sehingga banyak kegiatan tak diketahui warga (*Kompas*, 30/11/2022).

Keinginan agar warga DKI Jakarta, dan sesungguhnya juga warga di daerah lain, untuk bisa mengakses anggaran daerahnya bisa dipahami. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, anggaran daerah bukanlah informasi yang dikecualikan. APBD adalah informasi publik, bahkan bisa dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan mudah diakses oleh warga, apalagi menyangkut program kegiatan yang menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah tersebut.

Dalam konsiderans menimbang, UU No 14/2008 menegaskan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. Mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia (HAM), dan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik adalah sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan APBD DKI Jakarta sering disoroti publik sebab dinilai tidak tepat sasaran dan tak sesuai kebutuhan mewujudkan kesejahteraan warga. APBD, misalnya, justru diprioritaskan untuk menaikkan tunjangan anggota DPRD atau untuk pembentukan tim gubernur. Untuk pembangunan sumur resapan yang tak berfungsi atau untuk pembelanjaan barang yang tak perlu.

APBD DKI Jakarta 2023 harus dibuka, dan warga bisa mengawasi pemakaiannya demi kesejahteraan bersama.